

**REINVENTING KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
YANG RAMPING DAN EFISIENSI**

Zulkarnaini

Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Mengapa diperlukan sebuah reinventing kelembagaan pemerintah daerah, ada beberapa alasan antara lain :

1. Dengan otonomi daerah, yang mempunyai wilayah adalah Kabupaten/kota, lebih mengetahui kebutuhan penduduk yang berada di daerahnya apalagi pada tataran pemerintahan terendah. Misalnya Regrouping desa yang tipologinya sama , Pesisir pantai, daratan, pedalaman, Daerah Aliran Sungai (DAS). Masing-masing tipologi akan berbeda pola penanganan masyarakatnya, sumberdaya alamnya, teknologi yang dapat diterapkan, pola pinjaman yang berbeda (Pinjaman perorangan, Kelompok dengan tanggung renteng).
2. Pelayanan publik sangat tergantung pada jumlah lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan. Tentu pelayanan itu , mulai insan manusia lahir ke bumi sudah berurusan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta sampai meninggal dunia juga berurusan lembaga pelayanan.
3. Lembaga yang ada sekitar 35 Satuan Kerja pemerintah Daerah (SKPD), ini terlalu banyak, dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelayanan dapat dirampingkan, sehingga akan lebih mudah melakukan koordinasi dan keterkaitan tugas, sehingga pengendalian, agar tercapai sasaran pembangunan yang dikehendaki dan konsistennya lebih terjamin.
4. Aparat yang memegang dan pemangku jabatan, akan lebih fokus dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat, misalnya usaha terpadu dengan menyatukan kegiatan pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan atau peternakan. Artinya ada sumber pendapatan harian petani, pendapatan tiga bulanan petani, dan ada pendapatan tahunan petani. Secara simultan dapat dilakukan oleh satu tangan pemangku kepentingan. Andaikan dipisah satu sama lain, akan merencanakan yang satu di utara dan satu di selatan. Karena ego instansi, dan kepentingan instansi yang berbeda akan cenderung, lebih egois.
5. Kelebihan pegawai akibat perampingan, dapat dipindahkan ke Kabupaten / Kota dan atau memberikan pesangon bagi mereka yang mau pensiun dipercepat.

PERAMPINGAN KELEMBAGAAN

- a. Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan.
 - b. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi.
 - c. Pendapatan daerah dan keuangan
 - d. Pertambangan & Energy
 - e. Tenaga kerja, Kependudukan, Transmigrasi, Catatan Sipil, Keluarga Berencana
 - f. Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
 - g. Pendidikan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - h. Kesehatan dan badan Sosial
- (Studi banding Korpri Provinsi Riau ke Kabupaten Jembrana, tahun 2008/2009)

POLA KERJA KELEMBAGAAN

Lembaga tersebut di atas tidak perlu menangani secara langsung kecuali ada keterkaitan antar Kabupaten/Kota. Sistem pengelolaan anggaran dalam bentuk INGUB/ block grand kepada Kabupaten/Kota. Tugas Provinsi koordinasi perencanaan, pengawasan agar tercapai target yang direncanakan, hingga terwujud kinerja terbaik dan kuallitasnya.

Konsekwensi perampingan mengakibatkan ada pegawai yang tidak mendapat jabatan dan ada yang disalurkan ke Kabupaten /kota, bagi yang tidak mau dipindahkan, dipensiunkan dipercepat dengan mendapat uang tolak dengan mempertimbangkan masa kerja dan pangkat.

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan publik lebih profesional. Untuk menentukan layak dan tidak layak seorang pegawai dapat dipertimbangkan atas dasar kemampuannya, bila perlu penilaian yang ketat melalui uji kelayakan kemampuan oleh lembaga independent. Penggantian pejabat tergantung kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara konsekwen. Pangkat dan golongan boleh saja tinggi, tetapi tidak mampu melaksanakan tugasnya maka diturunkan dengan tidak memegang jabatan, jadi ia sebagai staff biasa. Sebaliknya walaupun pangkat rendah tetapi mampu, ia diberi kepercayaan memimpin lembaga.

Pelayanan masyarakat miskin dapat dilayani dengan sebuah kartu yang multi fungsi antara lain sebagai KTP, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta Asuransi jiwa. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemberdayaan melalui kebijakan anggran untuk masyarakat telah banyak dilakukan antara lain : Bantuan hibah atau Bantuan langsung Tunai, pinjaman bergulir, pinjaman dengan tanggung renteng, pinjaman dengan tingkat bunga bersubsidi, pinjaman tanpa bunga, pinjaman dengan bunga rendah.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin disediakan program saham bergulir. Pihak Pemerintah menyediakan dana abadi yang ditempatkan pada bank pemerintah dan atau perusahaan daerah atas nama pemilik penduduk miskin. Penduduk miskin mendapat deviden dibayarkan tiap bulan untuk biaya hidup 50 % dari deviden tersebut dan 50 % lagi mencicil saham dengan deviden yang diperoleh atas nama dirinya, maka pada saatnya, mereka sebagai pemilik saham atas nama dirinya tersebut.

Dalam rangka mengawasi kinerja masing-masing Satuan Kerja, diikuti dengan program Riau Net. Telekonferensi dapat dilakukan oleh petinggi dengan level jajaran terendah. Informasi setiap saat dapat diperoleh dengan media informasi dan teknologi yang ada.

REINVENTING GOVERNMENT

Konsep Mewirusahaakan Birokrasi (*Reinventing Government*) pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya yang berjudul *Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sektor*. Tulisan tersebut sebagai saran untuk membantu pencarian solusi di pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhan negara oleh pemerintah federal. Meskipun disambut dengan sikap skeptis, lambat namun pasti, apa yang disampaikan Osborne dan Gaebler dalam tulisan tersebut ternyata membawa angin segar bagi pemerintah federal dalam menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi pada saat itu.

Apa yang terjadi pada pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengawali era otonomi dimana sebagian wewenang pemerintah pusat didelegasikan pada pemerintahan di daerah. Di Era otonomi, pejabat daerah harus kreatif, mandiri dan inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas ke pemerintahannya karena inti dari otonomi daerah ialah keleluasaan dan kebebasan lebih luas untuk menggali dan mengolah aset-aset alamiahnya. Mereka akan lebih banyak bekerjasama langsung dan lebih luas dengan swasta. Hal inilah yang menjadi cakupan dalam *Reinventing Government* yang sering disebut juga dengan Mewirusahaakan Birokrasi.

Permasalahan yang sering muncul dalam memahami *reinventing government* adalah adanya anggapan bahwa dengan adanya konsep mewirusahaakan birokrasi tersebut berarti kantor dinas/ instansi di Pemerintahan Daerah (pemda) dituntut untuk “berbisnis” agar dapat memberi nilai tambah untuk PAD. Padahal, maksud yang sebenarnya adalah memberdayakan institusional. Bukan menciptakan “pengusaha” dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Menurut Osborne dan Gaebler, mewirusahaakan birokrasi berarti mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Di era otonomi daerah, dimana pemerintah di daerah dituntut untuk bisa mandiri, usaha tersebut dapat diterapkan agar produktivitas dan efisiensi kerja Pemerintah Daerah bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, pemahaman atas cara-cara mewirusahaakan birokrasi Pemerintahan Daerah harus dikuasai oleh aparat birokrasi, terlebih-lebih oleh Bupati/ Walikota termasuk pimpinan pada tiap-tiap instansi/ dinas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Osborne dan Gaebler mengemukakan sepuluh cara untuk membentuk birokrasi-wirausaha, yaitu :

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih menjadi pengarah daripada menjadi pelaksana. Misalnya adalah bekerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pemungutan pajak, akan tetapi penentuan Wajib Pajak dan besarnya pungutan pajak tetap dilakukan oleh pemerintah.
2. Pemerintah sebagai milik masyarakat harus lebih memberdayakan masyarakat ketimbang terus-menerus melayani masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan menghimbau masyarakat agar mampu mengurus keamanan lingkungannya sendiri.
3. Pemerintah sebagai institusi yang berada di alam kompetisi haruslah menyuntikkan semangat persaingan ke dalam tubuh aparat dan organisasi pelayanannya. Misalnya dengan memberikan peluang bagi swasta dalam menangani urusan-urusan yang dimonopoli pemerintah, seperti air minum, listrik, dan telepon.
4. Unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi harus lebih diberi kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Untuk itu, petunjuk pelaksanaan yang kaku dan mengikat harus dihindarkan, baik mengenai keuangan, kepegawaian, maupun pelayanan kepada masyarakat.
5. Pemerintah harus lebih mementingkan hasil yang akan dicapai daripada terlalu memfokuskan pada faktor masukan (input). Misalnya, pemberian bantuan untuk suatu sekolah haruslah lebih didasarkan kepada kinerja dan produktivitasnya daripada jumlah muridnya.
6. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan, bukannya memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Untuk itu, cara-cara baru dalam memikat pelanggan harus dilakukan.
7. Pemerintah sebagai suatu badan usaha harus pandai mencari uang dan tidak hanya bisa membelanjakannya. Oleh karena itu, cara-cara mencari sumber penghasilan yang baru dan menggalakkan investasi harus selalu menjadi pemikiran para manajer pemerintahan.
8. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki daya antisipatif harus mampu mencegah daripada hanya menanggulangi masalah. Misalnya soal kebakaran, dengan memakai prinsip ini, bukan mobil pemadam kebakaran yang dibeli terus tetapi supervisi/ pengawasan terhadap bangunan yang harus ditingkatkan.

9. Pemerintah harus menggeser pola kerja hierarki yang dianut ke model kerja partisipasi dan kerja sama. Misalnya, rantai organisasi yang panjang dan 'gemuk' harus dikurangi, struktur organisasi yang tebal harus ditipiskan, dan gugus kendali mutu harus dikembangkan.
10. Pemerintah sebagai pihak yang berorientasi pada pasar harus berusaha mengontrol perubahan lewat penguasaannya terhadap mekanisme pasar. Misalnya, dalam menangani sampah yang berasal dari botol minuman, daripada membiayai usaha daur ulang yang mahal, lebih baik pemerintah mensyaratkan pengusaha minuman untuk membayar setiap pembeli yang mengembalikan botolnya.

Berdasarkan kesepuluh cara tersebut di atas, tidak dapat dihindari bahwa upaya mewirauasakan birokrasi akan berdampak pada perubahan-perubahan (reformasi) dalam instansi Pemda. Perubahan yang dilakukan adalah dalam rangka melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap mekanisme birokrasi-wirauusaha di setiap lapisan birokrasi. Perubahan tersebut dapat berupa debirokratisasi, deregulasi, rekonstruksi pemerintahan daerah, reposisi instansi-instansi, bahkan rasionalisasi pegawai. Dalam perkembangannya, upaya-upaya penyesuaian tersebut harus dapat menjamin terciptanya produktivitas dan efisiensi kerja Pemda yang maksimal. Lebih meluas lagi, upaya mewirauasakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu :

- Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
- Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar
- Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
- Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
- Ada fakta/ realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan daripada sektor publik

Permasalahan utama yang muncul dalam mewirauasakan birokrasi di pemerintahan daerah pada dasarnya terletak pada instansi/ dinas Pemda itu sendiri.

Sejauh mana pelaku birokrasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan organisasi internal maupun di masyarakat, seberapa besar usaha pemerintah daerah untuk mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik dan bagaimana mereka menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi merupakan langkah-langkah yang harus diambil secara tepat.

Laju komunikasi, teknologi dan informasi yang berkembang dengan cepat, meningkatnya tensi-tensi politik dan tuntutan orang terhadap pelayanan yang baik adalah alasan yang sangat kuat untuk merubah birokrasi yang lambat, lama dan berliku-liku menuju birokrasi yang cepat, efektif, efisien, dan komprehensif. Disamping itu, upaya-upaya memandirikan dan meningkatkan produktivitas Pemda juga menimbulkan munculnya jenis-jenis tugas baru dalam pemerintahan daerah. Industrialisasi, perdagangan antar daerah, investasi asing di daerah, pengelolaan bantuan luar negeri di daerah dan hal-hal baru yang ditanggung pemda akibat adanya otonomi dari pusat mengharuskan pejabat-pejabat (birokrat) di daerah bekerja dengan spirit wirausaha.

Pada saat ini, di era otonomi daerah, di era globalisasi, di era *good local governance*, semangat wirausaha menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan bagi setiap aparatur pemerintahan, dari lapisan yang paling bawah sampai di tingkat atas, karena hampir setiap jenis organisasi berhubungan dengan kinerja yang inovatif dan produktif. Sepuluh cara mewujudkan *reinventing government* yang disampaikan Osborne dan Gaebler tersebut di atas secara praktis telah sukses dilakukan dan secara teoritis relevan untuk ditransformasikan, perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pun telah mendukung ke arah tersebut. Jadi, tidak perlu menunggu lama lagi untuk mewirausahakan birokrasi. Paling tidak usaha tersebut bisa dilakukan mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto ” Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Agung Kurniawan ” Transformasi Pelayanan Publik”, Penerbit Pembaharuan, Yogyakarta, 2005.
- Afiffudin ” Pengantar Administrasi Pembangunan ” Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.
- David Osborne Dan Ted Gaebler ” Mewirausahakan Birokrasi ” Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996
- David Osborne Dan Peter Plastrik ” Memangkas Birokrasi ” Penerbit Ppm, Jakarta, 2000.
- Fadel Muhammad ” Reinventing Local Government ” Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Riant Nugroho D ” Reinventing Indonesia ”, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.